

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
(Suatu Studi di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)
Kota Tidore Kepulauan)**

**EDI HAJI
BURHANUDDIN KIYAI
JERICHO D. POMBENGI**

Abstract : *This study aims to determine how the development of educational infrastructure (SMA / MA) and the role of local government in terms of infrastructure (infrastructure) education in secondary school (high school / MA) in Tidore Islands.*

The method used in this research is descriptive qualitative method. The study was conducted at the Department of Education, 4 high schools (SMA / MA), drawn from 26 schools in Tidore Islands and community education observers, thus the total number of informants is 11 people, while collecting data using interview techniques, techniques analysis used is qualitative analysis interactive model of Miler and Huberman.

Based on the results of the study it can be concluded that: openness or transparency of school in terms of development, so that the circumstances in which every person associated with the interests of education in schools can know the process and the results of school policy, it is, do not lie, do not cheat, honest, and open to public about what is done by the school. This openness is indicated in decision-making, planning and implementation of activities, the use of the budget and so on, which always involves the relevant parties as a means of control in order that development is not hampered because of the openness or transparency. Based on the results of research it is recommended suggestions: increasing dedication / contribution of stakeholders for education in schools, either in the form of services (thought / intellect, skills), moral, financial, and material / goods. empower the existing capabilities in the education stakeholders to realize the goal of education. enhance the role of stakeholders in the provision of education in schools. ensure that all decisions and measures taken truly reflect the aspirations of stakeholders and make the aspirations of stakeholders as commander for the implementation of development education in schools. The school must mobilize community participation in the form of anything that is relevant in the implementation of school programs, both physical and non-physical form in order to increase the participation of people divided into two categories, namely participation in the form of financial contribution and participation in the form of thought and effort.

Key words : The role of Government, Education Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia.

Dengan pendidikan segala potensi dan bakat yang terpendang dapat bermanfaat bagi diri pribadi maupun kepentingan orang banyak, dalam hal ini pendidikan menjadi faktor pendukung manusia mengatasi segala persoalan kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan

potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau dengan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat, Pendidikan merupakan suatu yang sangat uregan dalam kehidupan manusia, dalam kenyataannya pendidikan telah mampu membawah manusia kearah kehidupan yang lebih beradap, pendidikan telah ada seiringan dengan lahirnya manusia, ketika manusia muncul diranah itu puluh pendidikan muncul, pendidikan juga merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang, pembanguna hanya dipersiapkan melalui pendidikan, (Sri Minarti, 2011)

Secara umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (2), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang. Dan ayat (4), Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Keterlibatan pemerintah dalam wilayah pendidikan juga tidak harus dominan (sentralistis), pada pembangunan non-fisik semata-mata, tapi perlu kemudian dilakukan perimbangan yang adil antara pembangunan fisik dan non-fisik. Posisi pendidikan di daerah yang bila berkecenderungan diskriminatif dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang bersandar pada nilai-nilai keadilan, kiranya membutuhkan perbaikan serta penyesuaian yang proporsional.

Berikutnya, dalam pelaksanaan kebijakan menyangkut pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Tidore Kepulauan, kiranya perlu dimunculkan pertanyaan terkait seberapa pentingkah pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah menengah atas yang ada di Kota Tidore Kepulauan? Kenapa selalu dilakukannya revisi, koreksi, dan amandemen pada pembangunan pendidikan secara konseptual dalam tiap pergantian kepemimpinan, baik nasional maupun lokal? Apa sebabnya pendidikan di Kota Tidore Kepulauan, masih dianggap penting untuk diteliti oleh penulis? Benarkah pendidikan khususnya sekolah menengah atas di Kota Tidore Kepulauan, masi kurang ditemukannya pembangunan infrastruktur? Jika, pendidikan diproyeksikan untuk membangun masyarakat, maka perlu kiranya ada gerak kesadaran yang terlahir dari seluruh

masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk bersama-sama memperlihatkan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Tidore Kepulauan.

Bila ditinjau kebelakang, sejenak apa yang sampaikan Ki Hajar Dewantara dalam (Mohammad Yamin, 2009) pendidikan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme guna memperjuangkan kepentingan-kepentingan bangsa diatas kepentingan-kepentingan politik yang kerdil dan sempit, yang kemudian hanya mengorbankan kepentingan bangsanya. Pendidikan itu berupaya sekuat tenaga menanamkan rasa persaudaraan, persamaan, kesetiakawanan, dan kebersamaan hidup senasib sepenanggungan, membela bangsa dalam segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun kejiwaan, tidak peduli apakah penindasan tersebut berasal dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri. Pendidikan pun bermuara guna melahirkan rasa mencintai segala aset bangsa dan dijaga dengan segala cara, agar dapat dimanfaatkan bagi kebesaran dan kemakmuran bangsa.

Pasal 11 ayat (1), dalam undang-undang tersebut di jelaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Berikutnya bila kita membaca pasal 34 ayat (2), yang isinya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kini di Kota Tidore Kepulauan, bila ketegasan pasal diatas dijalankan secara ketat, maka akan ditemukan berbagai kesenjangan hingga pertentangan yang begitu mengganggu terwujudkan pendidikan seperti yang di dambakan masyarakat Kota Tdore Kepulauan.

Sementara itu, pemahaman akan hakikat pendidikan akan menyebabkan kita memahami peran, mendudukkannya, dan menilai pendidikan secara proporsional. (Sukardjo dan Komarudin, 2010).

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, di harapkan agar bisa secara konsisten melakukan perbaikan pendidikan di seluruh Sekolah Menengah Aatas di Kota Tidore Kepulauan khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah menengah atas. Pendidikan untuk semua (*education for everyone*) menjadi impian semua masyarakat Kota Tidore Kepulauan, dan mestinya dapat terlaksana di Kota Tidore Kepulauan dengan adil, dengan didukung berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan demikian, kiranya perlu penulis melakukan riset dan menegaskan, penyelidikan lebih lanjut, serta mengambil fokus kajian dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi Di SMA Kota Tidore Kepulauan).

Berdasarkan uraian diatas penulis menguraikan latar belakang maka dapat dikemukakan rumusan masalah

Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur (fisik) pendidikan, (1) Pembangunan ruang kelas (2) Pembangunan ruang perpustakaan (3) Pembangunan ruang beribada (4),Tempat olahraga, dan lain-lain di sekolah menengah atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan, telah berjalan efektif ?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur pendidikan (SMA/MA) dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrasturktur (sarana dan prasarana) pendidikan di sekolah menengah atas (SMA/MA) di Kota Tidore Kepulauan, telah berjalan efektif ?

Penelitian yang dilakukan di Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara, diharapkan memberikan manfaat dan keuntungan, diantaranya:

1. Secara Teoritis.

- a. Melakukan pendistribusian pengetahuan dan masukan pada

pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan, menyangkut arti penting pembangunan infrastruktur pendidikan dalam rangka penguatan kualitas kemanusiaan, serta berupaya meningkatkan bobot pengetahuan masyarakat tentang peran pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya pendidikan yang adil.

- b. Memberikan suplemen pada mahasiswa program studi Administrasi Negara dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik tentang pentingnya konsep pendidikan, dan studi pendidikan atau fokus pengkajian yang bersentuhan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan dalam upaya mengidentivikasi proses berjalannya pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Tidore Kepulauan.

2. Secara praktis.

- a. Diharapkan penelitian ini kiranya dapat di jadikan sebua acuan dan memberikan kontribusi yang positif pada pemerintah daerah maupun seluruh stakeholder pendidikan, untuk tetap konsisten dalam melakukan sosialisasi pendidikan, peningkatan pendidikan dalam aspek pembangunan infrastruktur pendidikan, Kota Tidore Kepulauan.
- b. Memberikan sumbangan positif pada pemerintah Kota Tidore Kepulauan, menyangkut arti pentingnya pendidikan, dan merangsang pemerintah daerah, masyarakat, atau para penggiat pendidikan (akademisi dan aktifis pendidikan) untuk dapat mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan Kota Tidore Kepulauan secara bersama-sama.

Peran pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang pemerintah daerah No 32 tahun 2004), Pasal 1 ayat 1 sampai 7

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
6. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pasal 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Thoha, (2013), menjelaskan istilah pemerintah selalu dipergunakan untuk menghubungkan antara dua hal yang berbeda satu sama lain. Kadang-kadang dikaitkan dengan kelembagaan (*institution*) yang menunjukkan adanya serangkaian prosedur aturan yang diterima untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dari waktu ke waktu tanpa memandang siapa yang bakal dikenai oleh prosedur aturan tersebut.

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk peningkatan kualitas SDM. Menurut Romo Mangun Wijaya, dalam (Yamin 2009) pendidikan adalah proses awal usaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Begitu pun dalam pandangan Muhammad Yamin (2009) adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era *eufklarung* (pencerahan). (Nurani Soyomukti. 2008), pendidikan adalah persemaian ide(ologi) dan pemikiran, suatu landasan yang digunakan untuk membangun bangsa.

Muhammad Yamin (2009), pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Dalam Nurani Soyomukti. 2008, berpandangan pendidikan merupakan latihan untuk memahami makna kekuasaan dan komponen yang terlibat didalamnya dalam berkomunikasi, tidak dalam pola kuasa-menguasai. Daed Joespef juga memberikan pandangannya tentang pendidikan, menurutnya pendidikan merupakan alat yang menentukan sekali untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia.

Dalam Mukhlisuddin Ilyas. (2009) alumnus menejemen pendidikan, Ilyas mengulas, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Nurani Soyomukti (2008), pertama-tama pendidikan harus dilakukan untuk penyadaran dan mendorong manusia mengenali dan melawan hambatan-hambatan material yang ada.

Dari pengertian-pengertian di atas jelas bahwa, dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.

Secara umum, Infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya dengan struktur di bawah struktural (*structure beneath a structureal*). Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan layer (lapisan) dari stuktur yang ada, Ibaratnya menyediakan support atau layanan (service).

Dalam Sri Minarti, (2011), menyebutkan sarana pendidikan adalah perlengkapan secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti, meja, kursi, dan media pengajaran, sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti, rung kelas, ruang perpustakaan, ruang beribada dan tempat olahraga.

Dalam melaksanakan amanat pemerintah, diterbitkan peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. Harapannya adalah tujuan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang telah di gariskan pada undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 segera terwujud.

Sedangkan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan

yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, Bafadal (2008) juga menyampaikan prinsip-prinsip dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan agar tujuan manajemen sarana dan prasarana dapat tercapai. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip pencapaian tujuan, pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondusif siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil bila fasilitas pendidikan itu selalu siap pakai setiap saat dan pada setiap personil sekolah yang akan menggunakannya.
2. Prinsip efisiensi, dengan prinsip efisiensi berarti semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisiensi juga berarti bahwa pemakain semua sarana dan prasaran pendidikan hendaknya di lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Dalam rangka itu, sarana dan prasarana pendidikan hendaknya di lengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharannya. Petunjuk teknis tersebut dikomunikasi kepada personil dilembaga pendidikan yang di perkirakan akan menggunakannya. Selanjutnya, bila dipandang perlu, dilakukan pembinaan terhadap semua personel.
3. Prinsip Administratif, dengan prinsip ini berarti semua pelaku pengelolaan sarana

dan prasarana pendidikan hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, insrtruksi, dan pedoman yang diprlakukan pemerintah atau institusi pendidikannya. Sebagai upaya penerapannya, setiap penanggung jawab pengelolaan sarana prasarana pendidikan hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan menginformasikan kepada semua personel institusi pendidikan yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan sarana dan prasarna pendidikan.

4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, manajemen sarana dan prasaran pendidikan baik dalam segi jumlah maupun pengelolaannya membutuhkan tidak sedikit orang yang terlibat. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat pengelolaan perlengkapan itu telah memilii tugas dan tangunjawab masing-masing antara yang dengan yang lainnya harus selalu bekerja semua dengan baik.
5. Prinsip kekohesifan, dengan prinsip kekohesifan berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan hendaknya terealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana itu telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, antara yang dengan yang lainnya harus selalu bekerja sama dengan baik.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan sistem pendidikan nasional, pemerintah diharapkan dapat mengemban amanat pasal 31 UUD 1945 ayat 4) tentang anggaran pendidikan agar mencapai sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belenja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Fungsi dan orientasi pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM pernah dibuat dalam satu kebijakan nasional, dalam tiga strategi pokok pembangunan pendidikan

nasional, yaitu: (1) pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan, (3) peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Berikutnya, titik tolak mengenai orientasi pendidikan nasional adalah: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan SDM yang berkualitas, terampil, dan ahli, (3) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati (Bodgan 1982). Williams dalam (Moleong, 2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan di lakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.

Penelitian kualitatif sering juga di artikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fonemena dalam suatu latar yang terkonteks khusus (Moleong, 2006).dari beberapa pengertian atau defenisi tersebut dapat di pahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fonemena tentang apa yag dialami oleh subjek penelitian , secara holistic dan dengan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks yang khusus.

Dalam Bungin (2007) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu posisi atau menjelaskan makna di balik realita. Penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang di peroleh di dalamnya.

Dalam Moleong, (2000), mengemukakan maksud ditetapkan fokus yaitu Pertama-tama menetapkan fokus, dapat membantu studi; kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi/memasukan mengeluarkan (*inclusion-inclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini di rumuskan dalam bentuk fokus penelitian yaitu :

Pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan di sekolah menengah atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan.

1. Sarana pendidikan, seperti komputer dan lain-lain yang menyangkut sarana pendidikan
2. Prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah dan lain-lain yang menyangkut prasarana pendidikan

Dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengambilan data pada instansi dinas pendidikan Kota Tidore Kepulauan dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan, dalam rangka mendapatkan data atau informasi yang cukup untuk kemudian dijadikan bahan analisis dalam skripsi nantinya.

Adapun yang menjadi sumber data informan dalam penelitian ini diambil dari berbagai pihak yang terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pendidikan yaitu :

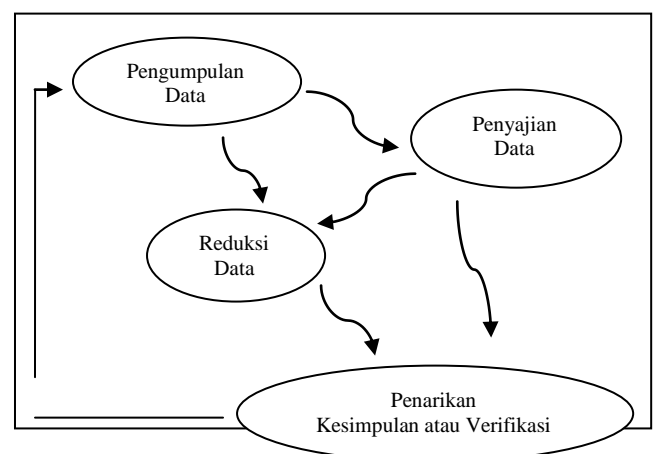
- Kepala dinas Pendidikan
- Kepala sekolah SMA
- Komite sekolah SMA
- Tokoh masyarakat pemerhati pendidikan

Sedangkan informan atau sumber data tersebut akan diambil di 4 (empat) sekolah menengah atas sampel yang dipilih secara random dari 26 sekolah menengah atas yang ada di Kota Tidore Kepulauan yaitu SMA dan MA. Dengan demikian jumlah seluruh informan adalah 11 orang.

Dalam penelitian kualitatif sumber data utama ialah kata-kata, dan tindakan: selebihnya ialah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006). Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode tersebut karena beberapa pertimbangan: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhaapan dengan kenyataan jamak: (2) metode ini menyaikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden: dan (3) metode ini lebih pekah dan lebih dapat menyusuaikn diri dengan banyak penajaman pengaru bersama terhdap pola-pola nilai yang di hadapi.

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif Miles dan Heberman (dalam Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan penlitu melekukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berahir pada vervikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses analisis data model interaktif diawali dari data yang telah terkumpul untuk kemudian dilakukan reduksi data. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus

selama penelitian berlangsung dan dilanjutkan setelah data terkumpul. Data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Langkah terakhir dari proses analisis ini ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman dalam Rohidi dan Mulyarto, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, letak kota Tidore kepulauan berada hampir di tengah tengah wilayah Propinsi Maluku Utara sehingga memiliki aksesibilitas yang hampir merata keseluruh kawasan Propinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan terdapat pusat pemerintahan propinsi, yang berpusat dikelurahan Sofifi. Sebagian besar sarana dan prasarana perkantoran pemerintah Propinsi diarahkan pembangunannya dikawasan tersebut. Kedekatan dengan Kota Ternate di Pulau Ternate juga mempermudah aksesibilitas dari Tidore ke Ternate yang terdapat sejumlah sentra jasa dan perdagangan serta pelabuhan dan Bandar udara yang memadai untuk pelayanan dalam skala nasional.

Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 1.645,73 km² dan berpenduduk sebanyak 100.865 Jiwa. Kota Tidore Kepulauan memiliki 8 kecamatan, 35 Kelurahan dan 37 Desa.

Kota Tidore memiliki keunikan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain di belahan ini, di mana keunikan lokal tersebut mempunyai peranan dalam menentukan arahan pengembangan Kota Tidore Kepulauan dimasa mendatang khususnya disektor pariwisata. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan aspek tersebut, sehingga Kota Tidore Kepulauan mempunyai posisi tawar terhadap daerah lain.

Batas wilayah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

- Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Barat
- Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan
- Bagian Barat berbatasan dengan Kota Ternate
- Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur Dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Tidore merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau Tidore dan beberapa pulau kecil serta sebagian daratan pulau Halmahera bagian barat. Pulau Tidore tergolong besar, di samping sebagian di daratan pulau Halmahera dan pulau-pulau kecil seperti pulau Maitara, pulau Mare, dan pulau Failonga.

Kota Tidore merupakan daerah dengan kondisi multietnik. Suku bangsa yang mendiami kota tidore kepulauan adalah penduduk asli masyarakat kota tidore kepulauan dan etnis pendatang diantaranya; Weda, Buton, Bugis, Makasar, Makean, Cina, Jawa, Gorontalo, sanger, Patani, Tobaru. Keanekaragaman tersebut merupakan sebuah kekayaan yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa itu memiliki sistem dan nilai budaya yang khas, yang membedakan jati diri mereka dari suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil-hasil karya yang akhinya dituangkan lewat interaksi antar individu, antar kelompok, dengan kondisi alam sekelilingnya. Perbedaan tersebut apabila tidak ditangani dengan baik dapat menjadi sumber pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Namun sebaliknya apabila dikelola dengan baik, akan menjadi salah satu perekat bangsa. Beranjak dari kondisi tersebut, perlu diupayakan pembinaan, pengkajian dan

penelitian sejarah dan budaya setiap suku bangsa. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat penghayatan sejarah dan pengamalan budaya bangsa.

Mata pencaharian penduduk kota tidore kepulauan berfariasi penduduk yang mendiami daerah pedesaan pada umumnya bekerja sebagai petani biasa dan petani tahunan (cingkeh, pala dan kelapa) dan wiraswasta. Disamping itu juga bekerja sebagai buru bangunan, sebagian juga nelayan, dan sebagian besar bekerja di Lembaga Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan dan Provinsi Maluku.

Masyarakat Tidore pada umumnya merupakan suku asli Tidore dengan struktur pemerintahan berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang *Kolano* (sultan), kebiasaan yang sangat menonjol dalam tata pergaulan masyarakat Tidore adalah gotong-royong yang merupakan satu sikap mental yang hidup dan terpelihara sampai sekarang.

Beberapa objek wisata yang ada di kota ini adalah pantai Ake Sahu, taman laut Pulau Maitara (Tanjung Tongowai), museum Kesultanan Tidore Sonyine Malige, pantai Cobo, benteng Tahu dan tugu pendaratan "Sebastiano De Elaco" (pelaut dari Spanyol, sedangkan transportasi yang ada di kota ini adalah mikrolet, becak motor, ojek. Untuk ke kota ini, bisa di tempuh dari kota Ternate dengan feri dengan waktu tempuh 30 menit dan speedboat yang waktu tempuhnya tak sampai 10 menit. Di kota ini juga terletak Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara yang merupakan ibukota defenitif provinsi Maluku Utara. Rencananya setelah infrastruktur pemerintahan dan fasilitas lainnya dibangun, aktivitas pemerintahan akan dipindahkan dari Ternate ke daerah ini. Sofifi berada di kecamatan Oba Utara pulau Halmahera.

Kota ini dipimpin oleh wali kota Drs. H Achmad Mahifa dan wakil wali kota Salahuddin Adrias, ST. Visi dan Misi Kota Tidore Kepulauan ini adalah "Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan yang Beriman, Maju, Mandiri dan Berperadaban.

Betapa besar pentingnya kebudayaan itu untuk suatu bangsa dan Negara yang

berawal dari pada kebudayaan daerah sangat meminta perhatian dan kesungguhan kita semua ikut menjaga, mengembangkan dan bahkan melestarikan, sehingga kebudayaan tetap berakar dan selanjutnya menghiasi wajah persadabunda pertiwi tercinta ini, apalagi budaya itu memiliki nilai-nilai yang memberikan semarak pengalaman daerah.

Kebudayaan Kota tidak terlepas dengan latar belakang historis yang panjang dan berpengaruh terhadap budaya dan adat istiadat di daerah ini. Kerjaan *Moloku Kie Raha* (Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo) pada dasarnya mempunyai budaya yang sama yang sering dikenal dengan budaya *Moloku Kie Raha*, hal ini karena empat kerajaan yang dipimpin oleh sultan yang mempunyai satu garis keturunan atau kakak beradik dalam sejarah mempunyai satu keturunan bangsa Arab, berkaitan dengan hal tersebut masuknya agama Islam di Maluku juga turut mempengaruhi budaya serta adat istiadat di daerah ini.

Kota tidore kepulauan cukup kaya berbagai ragam bahasa daerah yang terdiri dari beberapa suku bangsa, Dari beragam suku bangsa dan bahasa daerah beragam pula budaya dan adat istiadat serta kebiasaannya yang sangat menonjol dalam tata pergaulan masyarakat Kota Tidore Kepulauan adalah tolong menolong atau gotong royong yang merupakan satu sikap mental yang hidup dan terpelihara sampai masa kini yang merupakan peninggalan masa lalu seperti nampak pada beberapa adat kebiasaan yang bersifat sosial antara lain: *Mayae* (bentuk tolong menolong dalam hal pembersihan dan pembangunan rumah)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa tujuan penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pendidikan (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan

Untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur pendidikan dan peran yang dilakukan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana), pendidikan khususnya sekolah menengah atas (SMA/MA), maka dilakukan wawancara sebanyak 11 orang informan yang diambil dari Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah SMA/MA, Komite sekolah SMA/MA, dan Tokoh masyarakat pemerhati pendidikan SMA/MA, di empat sekolah yang terpilih. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan

Berdasarkan analisa data wawancara dengan para informan tersebut diperoleh gambaran tentang pembangunan infrastruktur pendidikan (SMA/MA) dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan di sekolah menengah atas (SMA/MA) di Kota Tidore Kepulauan.

1. Informan inisial Drs. A.I (Kabid Dikmen).

Pemerintah daerah memesukkan atau menuangkan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan di dalam rencana jangka panjang atau rencana jangka menengah Kota, yang diwujudkan dalam program dinas pendidikan pemuda dan olahraga, sedangkan rencana strategi pendidikan Kota Tidore Kepulauan dari sektor pendidikan menjadi bagian dalam melaksanakan pembangunan pendidikan yaitu dengan memasukan program strategis dari pemerintah daerah, dalam pelaksanaan program dikembangkan ke Dinas pendidikan sebagai Instansi kerjah langsung dengan proses pendidikan

Sedangkan alokasi anggaran tetap ada dari pemerintah daerah tapi karena kebutuhannya banyak maka di prioritaskan pada sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan dan bertahap, pemerintah daerah tidak langsung membina sekolah tetapi melalui Dina Pendidikan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota untuk membina sekolah, belum ada petunjuk teknis dari pemerintah kota yang ada hanya petunjuk penggunaan dan pemeliharaan saja, sedangkan yang memantau dan mengawasi pengadaan melalui Inspektorat daerah yang berasal dari bantuan pemerintah Kota, sedangkan pemerintah mengevaluasi pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan di SMA/MA dengan cara evaluasi data melalui inspektorat daerah, Kami selaku pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengusahakan pengadaan infrastruktur yaitu memberikan bantuan dalam bentuk perpustakaan leb dan lain-lainnya, pmerintah Kota Tidore Kepulauan

membantu atau memfasilitasi pihak sekolah menggerak atau menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengadaan infrastruktur melalui pemberdayaan komite sekolah.

2. Informan inisial I. H S.Pd (Kepalah Sekolah SMA N 1 Kota Tidore Kepulauan) dan inisial Ir. H. A, M.Si (Komite sekolah)

Pihak sekolah menerima bantuan dan melaksanakan bantuan dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sedangkan bantuan yang diterima dari pihak sekolah berupah sarana dan prasarana dengan cara melakukan atau mengajukan proposal di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur menurut kami bagus karena dari sekolah-sekolah hampir merata pembangunannya, menurut pendapat dan penilaian inisial **I.H**, sejauh mana perhatian dan keseriusan dan wujud perhatian dan keseriusan pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap SMA N 1 Kota Tidore Kepulauan berupa bangunan atau gedung untuk (RKB), aula, laboratorium dan lain-lainnya.

Sesuai pengamatan inisial **H.A**, tindakan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam merespon kekurangan sarana dan prasarana yang di ajukan pihak sekolah melalui proposal, baik tanggapannya dari pihak pemerintah, menurut pendapat saya pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pendidikan harus lebih banyak datang di sekolah-sekolah melihat langsung kekurangan dan kelebihan dari sekolah itu sendiri.

3. Informan inisial S.K S.Pd (Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan), dan inisial R.K, S.Pd (Ketua Komite)

Menurut penilaian dan pendapat inisial **S.K**, komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah kami baik dan memuaskan, keseriusan pemerintah Kota dalam pembangunan infrastuktur itu menurut kami baik dan kekurangan infrastuktur sekolah kami selalu di dengan baik oleh pihak pemeintah, tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan membantu mempercepat kluhan sekolah

berupa sarana dan prasarana yang di ajukan pihak sekolah melalui proposal

Menurut inisial **R.K**, harapan kedepan pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus melakukan monitoring langsung di sekolah-sekolah tanpa menunggu keluhan dari sekolah-sekolah dan usahakan lebih baik lagi

4. Informan inisial Dra. F.S (Kepalah Sekolah MA Nurul Huda Dowora), dan inisial I.H, S.Pd.I (Ketua Komite)

Sejak sekolah kami berdiri pada tahun 2000 sampai saat ini belum ada bantuan infrastruktur (saran dan prasarana) yang kami terima dari pemerintah Kota Tiore Kepulauan berupa ruang kelas dan sebagainya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Menurut inisial **F.S**, komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan belum merata dan masih berpihak di sekolah-sekolah unggulan dan sekolah kami dipandang sebelah mata oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, perhatian dan keseriusan peran pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan belum ada wujud dari perhatian dan keseriusan itu contohnya selama ini belum ada sarana dan prasarana yang didapat pada sekolah kami berupa gedung kelas dan laian-lain hanya tempat pembuangan sampa 6 buah yang kami dapat dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan, menurut pengamatan kami selama ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota.

Menurut inisial **I.H**, tindakan kedepan yang dilakukan pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk 5 tahun kedepan diharapkan kepada pemerintah yang baru jangan membedakan antara sekolah kami dan sekolah-sekolah yang lain dalam hal pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan karna kami juga anak bangsa yang juga membutuhkan sarana dan prasarana sekolah seperti sekolah yang lain.

5. Informan inisial A.S, S.Pd.I (Kepalah Sekolah MAS Al-Khairaat Guraping), dan inisial G.W, S. Pd.I (Ketua Komite)

Penilaian dan pendapat kami komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah perlu

di perhatikan dan tinjauan kembali dalam hal pembangunan infrastruktur, sedangkan keseriusan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur menurut kami belum terlaksanakan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan tidak merata dan perlu di perhatikan kembali oleh pihak pemerintah, dalam mengatasi kekurangan atau ketidaklengkapan infrastruktur pendidikan belum terlaksana dengan baik oleh pemerintah, harapan inisial **A.S**. kedepan usahakan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam penenganan pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemerataan pembangunan pendidikan harus di perhatikan dan ditinjau kembali.

6. Informan inisial H.I, S.Pd (Tokoh masyarakat pemerhati pendidikan)

Menurut saya komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur sudah cukup bagus tapi lebih di tingkatkan lagi agar bisa menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi atau setidaknya mutu pendidikan yang berstandar, dari perhatian dan keseriusan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sudah cukup baik tapi itu baru bisa dikatakan 60 % saja sebab di tiap kecamatan butuh perhatian dari pemerintah agar bisa melihat langsung keadaan sekolah, menurut saya kekurangan atau ketidaklengkapan infrastruktur pendidikan pada SMA/MA disini yaitu sangat berkurangnya fasilitas pendidikan berupa komputer dan buku-buku panduan atau buku cetak sehingga berpengaruh juga pada SDM yang kurang bermutu

Menurut saya pembangunan infrastruktur pendidikan di SMA/MA kedepan harus lebih ditingkatkan lagi agar pendidikan di Kota Tidore Kepulauan juga bisa bersaing dengan Kota-Kota lain

7. Informan inisial R.L, S.Pd (Tokoh masyarakat pemerhati pendidikan)

Menurut saya komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan cukup baik cuman menurut saya lebih ditingkatkan lagi komitmen tersebut, sedangkan perhatian dan keseriusan pemerintah Kota Tidore Kepulauan masih

minim nyatanya pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) di lingkungan sekolah menengah atas belum merata pembangunannya, sedangkan tindakan yang telah dilakukan pemerintah Kota Tidore Kepulauan menurut saya belum tepat sasaran dan belum ada menurut pandangan saya, dan sedangkan harapan yang perlu dilakukan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di sekolah menengah atas kedepan nanti harus lebih ditingkatkan lagi dan upayakan monitor langsung di sekolah-sekolah mana yang kekurangan dan manah yang kelebihan sarana dan prasarana.

Rangkuman Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan para informan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan di sekolah menengah atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan di sekolah menengah atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan sebagaimana telah dideskripsikan di atas, dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

1. Semua informan yang diwawancarai yaitu Kepala dinas Pendidikan, Kepala sekolah SMA/MA, Komite sekolah SMA/MA, dan Tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, dari pihak pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan), menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) dalam pelaksanaannya baik dan tepat sasaran dalam pembagian infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan dan perawatan infrastruktur (sarana dan prasarana), begitupun SMA N 1 dan SMA N 3 menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) di sekolah mereka baik dan tepat yang telah di tangani oleh pemerintah (Dinas pendidikan Kota Tidore Kepulauan) dalam pelaksanaannya memuaskan dan tepat sasaran

2. Sedangkan informan di sekolah MA Dowora dan MA Guraping, menyampaikan penyesalan terhadap pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal pembangunan infrastruktur (Sarana dan prasarana) pendidikan menurut kedua belah pihak dalam penyaluran bantuan pemerintah khususnya infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan belum merata maka pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus melakukan teknik-teknik pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan pemerintah dan sekoah-sekolah yang memiliki kelebihan bantuan dan bukan hanya sekolah negeri yang harus selalu mendapatkan bantuan pemerintah, sedangkan kami sekolah swasta pun membutuhkan bantuan dari pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan. Aspirasi dan usulan Tokoh Masyarakat Pemerhati Pendidikan. pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur sudah cukup bagus akan tapi lebih di tingkatkan lagi agar bisa menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi atau setidaknya mutu pendidikan yang berstandar seperti daerah-daerah lain dan harus lengkap infrastruktur (sarana dan prasarana) pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan di SMA/MA kedepan harus lebih ditingkatkan lagi agar pendidikan di Kota Tidore Kepulauan juga bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pendidikan, di sekolah menengah atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan sebagaimana telah dideskripsikan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan.

Keterbukaan atau transparansi sekolah dalam hal pembangunan, agar keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan di sekolah dapat mengetahui proses dan hasil kebijakan sekolah, apa adanya, tidak bohong, tidak

curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah. Keterbukaan ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol agar supaya pembangunan tidak terhambat karena adanya keterbukaan atau transparansi.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan dan berdasarkan temuan data dilapangan, maka perlu kiranya diberikan saran (rekomendasi) beberapa hal, terkait hal dimaksud.

Pihak sekolah harus menggalang partisipasi dari semua pihak yang terkait dengan kepentingan pendidikan agar pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana bisa berjalan dengan baik, bentuk partisipasi sebagai berikut :

Memberdayakan kemampuan yang ada pada *stakeholders* bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

Meningkatkan peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai *advisor, supporter, mediator, controller, resource linker, and education provider*

Menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* dan menjadikan aspirasi *stakeholders* sebagai panglima bagi penyelenggaraan pembangunan pendidikan di sekolah

Pihak sekolah harus menggalang masyarakat dalam partisipasi berupa apa saja yang relevan dalam pelaksanaan program sekolah, baik berupa fisik maupun non fisik agar peningkatan partisipasi masyarakat dipilah dalam dua kategori, yaitu partisipasi dalam bentuk kontribusi pembiayaan, dan partisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga.

DAFTAR PUSTAKA.

Bafadal, I. 2008. Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara.

Bogdan, Robert C., Biklen, 1982. *Qualitative Researc for Education*; Allyn and Bacon Inch. Boston London.

Bungin, H. M. Burhan, 2007. Penelitian kualitatif. Jakarta: PT. Rieneka Cipta

Ilyas, Mukhlisuddin. Dalam Artikel implementasi Pendidikan Perspektif Pemerintahan Daerah. PT Bumi Aksara Jakarta : 2009.

Moeleong, Lexy. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Moeleong, Lexy. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Rosdakarya.

Nurani, Soyomukti. Metode Pendidikan Marxis Sosialis; Antara Teori Dan Praktek, Jogjakarta: Ar- ruzz Media, 2008

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga. (2014 - 2015).

Rohidi dan Moeljarto, 2002. *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta

Robert C., Biklen Bogdan, 1982. *Qualitative Researc for Education*; Allyn and Bacon Inch. Boston London.

Sukardjo dan Ukim Komarudin. 2010. Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengolah Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar-Razz Media, 2011)

Thoah, Miftah, MPA, *Birokrasi Dan Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Yamin, Mohammad, *Menggugat Pendidikan Indonesia; Belajar Dari Paulo Freire Dan Ki Hajar Dewantara*, Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2009

Sumber-sumber Lain

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1 Sampai 7, Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Bab II Pasal 2.

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Standar Sarana prasarana.

